

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).
- Sibuea, Hotma Pardomuan & Sukartono, Heryberthus, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakataw Book, 2009).
- Sihombing, Jonker, *Otoritas Jasa Keuangan*, cet.1, (Jakarta: Ref Publisher, 2012).
- Assiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, cet. 3, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, cet. 1, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, cet. 1, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Tumanggor, M.S., *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Uang, Pasar Modal dan Penanaman Modal*, cet.3. (Jakarta: CV Raterindo, 2014).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet 9, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: UI-Press, 2006).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

### **Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-16/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011 Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I –A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Peraturan Bapepam-LK X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.02/2014 tanggal 1 April 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain**

*Financial Services Act 2012*

*The Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001.*

### **Jurnal**

Hammid, Celeste M and Landini, Ilaria. “The Global Subprime Crisis as Explained by the Contrast Between American Contracts Law and Civil Law Countries' Laws, Practices, and Expectations in Real Estate Transactions: How the Lack of Informed Consent and the Absence of the Civil Law Notary in the United States Contributed to the Global Crisis in Subprime Mortgage Investments”, *Journal of International Business & Law*, Vol.11 (2012): 133-169.

Ferran, Eili's. "The Break Up of Financial Services Authority", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 31, No. 3 (2011): 455–480.

### Sumber lain

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (Perubahan) tanggal 7 Desember 2012, <http://ikatannotarisindonesia.or.id/downloads/Perubahan%20ART%20INI.pdf>, diunduh 9 Januari 2015.

Anggaran Rumah Tangga Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 16 Nopember 1990, <http://www.hkhpm.com/tentang/lembar-ad-rt/anggaran-rumah-tangga.html>, diunduh 9 Januari 2015.

Bank of England, <http://www.bankofengland.co.uk/pru/pages/about/default.aspx>, diunduh tanggal 2 Januari 2015

Jones, Cheryl, *Could law firms be brought under the FCA's regulatory regime?*, <http://blogs.lexisnexis.co.uk/fs/could-law-firms-be-brought-under-the-fcas-regulatory-regime/>, diunduh 2 Januari 2015.

Simatupang, Dian Puji N., *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian hukum Normatif*, (makalah disampaikan pada perkuliahan Metode Penelitian dan Penelusuran Literatur Hukum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Depok, 16 April 2010

Financial Conduct Authority Handbook, <http://www.fshandbook.info/FS/html/handbook/FEES/1/1>, diunduh pada tanggal 2 Januari 2015.

Financial Conduct Authority, *Do I need to be authorised?*, <http://www.fca.org.uk/firms/about-authorisation/do-i-need-to-be-authorised>, diunduh 9 Januari 2015.

Hukum Online, *Ramai-Ramai Mempersoalkan Aturan Pungutan OJK*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534ceb94476d3/ramai-ramai-mempersoalkan-aturan-pungutan-ojk>, diunduh 19 Juni 2014.

Assididqqie, Jimly, *Perihal Undang Undang*, <http://www.jimly.com/pemikiran>, diunduh 19 Juni 2014.

Memorandum of Understanding between the Financial Conduct Authority (FCA) and the Solicitors Regulation Authority concerning exempt professional firms; and authorised professional firms,

<http://www.sra.org.uk/documents/sra/memorandum-understanding-mou-financial-conduct-authority-fca.pdf>, diunduh 9 Januari 2015.

Asmawidjaja, Mufli, *Pengenalan Pasar Modal*, (Makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar I), Jakarta, 27 Desember 2011.

\_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*,  
<http://www.jimly.com/pemikiran>, diunduh 19 Juni 2014.

OJK : Problem Pungutan Notaris, Diabaikan Jangan  
[http://medianotaris.com/ojk\\_problem\\_pungutan\\_notaris\\_diabaikan\\_jangan\\_berita412.html](http://medianotaris.com/ojk_problem_pungutan_notaris_diabaikan_jangan_berita412.html), diunduh 5 Januari 2015.

Risalah sidang perkara nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Acara mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (V), tanggal 18 September 2014, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah\\_sidang\\_7037\\_20140930024217\\_25.PUU-XII.2014%2018%20SEPTEMBER%202014.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7037_20140930024217_25.PUU-XII.2014%2018%20SEPTEMBER%202014.pdf), diunduh tanggal 5 Januari 2014.

Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014,  
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume\\_perkara\\_1172\\_Perbaikan%20Permohonan%20No%2025.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_perkara_1172_Perbaikan%20Permohonan%20No%2025.pdf), diunduh 11 Januari 2015.

Risalah sidang perkara nomor 25/PUU-XII/2014 perihal Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Acara mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (VI), tanggal 8 Oktober 2014, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah\\_sidang\\_7089\\_25.PUU-XII.2014%208%20Oktober%202014%20by%20Wisnu.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_7089_25.PUU-XII.2014%208%20Oktober%202014%20by%20Wisnu.pdf), diunduh tanggal 5 Januari 2015.

Sudarwati, Yuni, *Pungutan Otoritas Jasa Keuangan*, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-42.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-42.pdf), diunduh tanggal 9 Januari 2015.

AS, Wisnu, *Asuransi Mungkin Bebankan Iuran OJK kepada Nasabah*, <http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/25/2/218780/Asuransi-Mungkin-Bebankan-Iuran-OJK-kepada-Nasabah>, diunduh tanggal 8 Januari 2014.

## **Wawancara**

Farida, Andalia, Notaris di Jakarta, wawancara tanggal 8 Januari 2015.

Hermawan, Charles, Notaris di Kota Tangerang, wawancara tanggal 6 Januari 2015.

Atyanto, Genio, Konsultan Hukum Pasar Modal, wawancara tanggal 6 Januari 2015.

